

ETNIS TIONGHOA: PLURALISME DAN REGULASI BIROKRASI DI INDONESIA

A Maftuh Sujana, Eva Syarifah Wardah, Alfiah
UIN Sultan Maulana Hasanuddin BANTEN
maftuhsujana@gmail.com, evawardah72@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mencoba mengulas dan memberikan gambaran tentang kehidupan warga Indonesia yang leluhurnya dari Tionghoa ataupun peranakan. Selain itu juga di gambarkan kehidupan yang pluralis serta kebijakan yang melandasi sikap pluralis tersebut. Metode yang di gunakan dalam penelitian adalah metode sejarah, dengan empat tahap yakni Heuristik, Verifikasi, Intepretasi dan Historiografi. Hasil temuan menunjukkan bahwa warga minoritas Tionghoa di Indonesia terdapat dua kelompok yaitu Cina Peranakan dan Cina Totok. Tionghoa totok adalah orang asli Tionghoa yang berdarah murni Cina (totok Tionghoa), sedangkan cina peranakan adalah hasil percampuran antara warga Tionghoa Asli dengan penduduk tempatan. Perbedaan keduanya terletak pada bahasa yang digunakannya di rumah. Terdapat juga perbedaan-perbedaan dalam logat dan dialek, ucapan dalam kehidupan sosial budaya dan dalam corak pendidikan serta dalam adat istiadat lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh karena pengaruh dari lingkungan kehidupan masyarakatnya. Pluralitas ke Indonesiaan mulai tampak saat KH. Abdurahman Wahid sebagai Presiden menghapus politik asimilasi diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000, dilandasi oleh pemikiran demokrasi KH. Abdurahman Wahid tidak sejalan dengan implementasi kebijakan yang diberlakukan pada masa Orde Baru.

Keyword. Pluralisme, Tionghoa, Diskriminasi, Abdurahman Wahid.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya, suku, agama, ras dan golongan-golongan yang berujung pada kemajemukan. Kemajemukan ini di dalamnya terdapat kelompok Tionghoa yang hidup bersama dengan masyarakat Indonesia lainnya. Keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia dengan berbagai peranannya kurang diterima dengan baik oleh masyarakat pribumi sejak tahun 1930-an. Akibatnya hubungan antara penduduk pribumi dan etnis Tionghoa di Indonesia tidak terjalin dengan baik pula (Siska Yulia Nurda, dkk. tt : 3). Ketidak harmonisan yang terjalin antara masyarakat pribumi dan etnis

Tionghoa di Indonesia sering membuat etnis Tionghoa merasa didiskriminasikan, terlebih pada saat diberlakukannya kebijakan asimilasi total oleh Presiden Soeharto. Sejatinya, kebijakan asimilasi ini bertujuan meleburkan kebudayaan minoritas etnis Tionghoa dalam kebudayaan mayoritas masyarakat pribumi ke dalam satu wadah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai peraturan yang asimilatif telah ditetapkan dan dilaksanakan pada masa Orde Baru. Pada hakekatnya kebijakan asimilasi bertujuan menghapus tiga pilar utama kebudayaan Tionghoa yang terdiri atas media massa atau pers berbahasa Tionghoa sekolah-sekolah Tionghoa, dan

organisasi-organisasi Tionghoa. Penghilangan tiga pilar utama kebudayaan Tionghoa ini merupakan tindakan pemerintah yang diskriminatif terhadap etnis Tionghoa.

Kebijakan asimilasi dan politik diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia yang dilakukan oleh Presiden Soeharto mulai mengalami perubahan pada masa Reformasi. Keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia mulai diakui dan diperhatikan kembali, terlebih pada masa pemerintahan KH. Abdurahman Wahid. Usaha KH. Abdurahman Wahid dalam keberpihakannya terhadap kelompok minoritas, khususnya etnis Tionghoa (yang dalam hal ini adalah menghapus diskriminasi), lebih diwujudkan ketika KH. Abdurahman Wahid menjabat sebagai presiden Republik Indonesia tahun 1999-2001.

Etnis Tionghoa tidak dipaksakan lagi untuk berasimilasi total dengan penduduk pribumi, KH. Abdurahman Wahid berusaha membebaskan etnis Tionghoa di Indonesia dari kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi keberadaan etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa di Indonesia diperbolehkan untuk melakukan semua aktivitas keagamaan, bahkan dibebaskan untuk mempertahankan identitas Tionghoanya (Siska Yulia Nurda, dkk, : 3). Tanggal 13-14 Mei 1998 adalah hari-hari yang penting bagi etnis Tionghoa di Indonesia karena, selama dua hari itu di Jakarta dan Solo terjadi kerusuhan anti Tionghoa secara besar-besaran. Kaum minoritas ini tidak mendapat perlindungan sama sekali dan teriakan mereka tidak didengar oleh penguasa. Peristiwa itu telah mengejutkan masyarakat Tionghoa dan dunia internasional. Mereka yang mampu telah mengungsi keluar negeri, tetapi sebagian besar tetap berdiam di Indonesia.

Masyarakat Tionghoa umumnya bingung, kalau bukan putus asa. Bahkan banyak yang bertanya-tanya apakah masih ada tempat bagi etnis Tionghoa di Republik Indonesia ini (Leo, Suryadinata, 2010: 201).

PEMBAHASAN

A. Awal Kedatangan Tionghoa di Indonesia

Sebelum berdirinya Negara yang diberi nama Indonesia di tanah Jawa, etnis Tionghoa sudah menginjak kaki di tanah Jawa ini. Dari berbagai catatan sejarah para pedagang Tionghoa telah datang ke daerah pesisir laut Cina selatan sejak 300 tahun sebelum masehi, namun catatan sejarah tertulis menunjukkan mereka datang ke Asia Tenggara lama setelah itu (Abdullah Dahana, 2001: 54). Beberapa catatan tertua ditulis oleh para agamawan, seperti Fa Hien pada abad ke-4 dan I Ching pada abad ke-7. Fa Hien melaporkan suatu kerajaan di Jawa (*To lo mo*) dan I Ching ingin datang ke India untuk mempelajari agama Buddha dan singgah di Jawa untuk mempelajari bahasa sangsekerta. Di Jawa, I Ching berguru pada seseorang yang bernama Janabhadra (FX. Lilik Dwi M, : 2017: 1). Dalam catatan kuno Cina menyebutkan bahwa kerajaan-kerajaan kuno Jawa sudah menjalin hubungan erat dengan dinasti-dinasti yang berkuasa di Cina.

Pada abad ke-14 ditemukan sumber yang menyatakan adanya perkampungan orang Tionghoa Islam di muara sungai Brantas Kiri atau yang sekarang disebut Kali Porong. Pada awalnya mereka hanya tinggal beberapa waktu yang pendek selama masa kunjungan perdagangan yang dilakukan di beberapa kota pesisir. Namun melihat kekayaan dan potensi tanah Jawa pada tahun-tahun berikutnya banyak etnis Tionghoa berdatangan dan menetap di

Jawa untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik dengan tujuan utamanya adalah berdagang.

Kedatangan mereka (etnis Tionghoa) diterima dengan baik oleh warga pribumi, akulturasi yang berjalan antara dua kebudayaan tersebut berjalan dengan baik. Bahkan karena para perantau Tionghoa yang datang ke Jawa didominasi oleh kaum laki-laki orang-orang tionghoa ini kemudian menikah dengan wanita-wanita pribumi. Banyak diantara anak-anak mereka ini memeluk agama islam dan banyak diantara mereka ini yang menikah dengan anak-anak wanita dari keluarga kerajaan. Hal inilah yang menjadi salah satu jalan penyebara agama Islam di Nusantara oleh orang-orang Tionghoa. Kedekatan orang-orang Tionghoa dengan kerajaan yang berkuasa pada saat itu diantaranya Majapahit abad pada masa kekuasaan Hayam Wuruk member banyak keuntungan, diantaranya muncul berbagai perlakuan istimewa terhadap orang asing dengan memberikan kedudukan setara dengan pejabat dan memberikan wewenang kepada orang-orang asing diantaranya orang-orang Tionghoa (Adrian Perkasa, 2012: 47). Tak heran jika berbagai perlakuan istimewa didapatkan oleh orang-orang Tionghoam karena keberadaan mereka bias dikatakan sangat berperan besar dalam perkembangan perekonomian ditanah Jawa, khususnya kemakmuran Majapahit. Orang-orang Tionghoa yang menetap di Jawa mengembangkan kota-kota pelabuhan penting di pantai utara seperti Gresik, Tuban dan Surabaya. Mereka adalah peoneers pertama dari imigran-imigran Tionghoa ke *Nan-Yang* (Lautan Selatan).

Namun dibalik keadaan Majapahit yang mencapai puncak kejayaannya pada saat itu terdapat sebuah kondisi

stratifikasi sosial dalam catatan Ma Huan ketika dia mengunjungi ibu kota kerajaan Majapahit, Trowulan dalam armada pelayaran Cheng Ho. Dalam catatannya terdapat tiga kelompok sosial disana yaitu (W.P. Groeneveldt, 2009: 63-69).

- a. Masyarakat muslim *Huihui* atau *Huihui ren* yang berasal dari barat dan menetap disana. Disebutkan bahwa pakaian dan makanan mereka bersih dan layak (dalam manuskrip asli Ma Huan yang memakai aksara Cina jelas disebutkan *Huihui*, sedangkan dalam terjemahan Indonesia kata ini dirubah maknanya yaitu kelompok arab . padahal aksara itu dikalangan arab adalah *Ta Shih*).
- b. Masyarakat Tionghoa atau *Tang ren* yang berasal dari *Guangdong*, *Zhangzou*, dan *Quazhou*. Mereka adalah pelarian dari daerah asalnya dan menetap di ibu kota kerajaan Majapahit. Pakaian dan makanan mereka sangat layak dan bagus. Mayoritas dari kelomok ini adalah beragama Islam dan mengajarkan ajarannya.
- c. Penduduk pribumi. Menurut Ma Huan, kelompok ini sangat kotor dan jelek. Tidak memakai alas kaki dan makanan mereka tidak layak namun banyak dari mereka kaya dan menyukai barang mewah seperti porselen dari Cina. Perbedaan antara raja dan rakyat sangat kentara seperti keratin raja yang megah sedangkan rumah tinggal penduduk hanya beralaskan jerami.

Dalam catatan tersebut menunjukkan bahwa kejayaan yang diperoleh oleh kerajaan Majapahit tidak sepenuhnya dinikmati oleh rakyat

Majapahit yang masih hidup pada tingkatan sosial paling bawah dibawah bangsa asing yang mendiami tanah Jawa ini. Kedudukan orang Tionghoa yang beragama islam dengan kemapanannya juga sangat berpengaruh terhadap penyebaran dan perkembangan ajaran islam di Majapahit. Karena dengan kedudukan tersebut akan dengan mudah bagi orang Tionghoa yang beragama islam untuk memberikan pengaruhnya terhadap orang pribumi keluarga kerajaan untuk mempelajari ajaran islam. Bahkan banyak diantara anggota keluarga kerajaan yang menikah dengan orang-orang Tionghoa yang beragama islam yang pada akhirnya memeluk islam dan hal ini sangat berpengaruh kepada rakyat Majapahit untuk memeluk agama islam.

Setelah ratusan tahun berlalu, kebudayaan Tionghoa semakin berbaur dengan tatacara kehidupan komunitas yang lebih dulu menapakkan kaki di Nusantara bahkan dalam hal tertentu, kebiasaan atau istilah tertentu sepertinya khas Tionghoa, ternyata hanya ditemukan di Nusantara, tidak didaerah lain. Hal itu dikarenakan pertalian antar budaya etnis yang kuat. Sehingga menimbulkan cirri Khas tersendiri. Hal ini diperkuat dengan beberapa bukti sejarah, diantaranya beberapa motif relative di Candi Sewu yang berada diwilayah Yogyakarta diduga juga mendapat pengaruh dari motif-motif kain sutera Tiongkok (Rustopa,2008). Perpaduan budaya Tionghoa dengan Jawa telahmenghasilkan berbagai barang seni kerajinan yang bermutu tinggi.

Hal ini Nampak jelas pada corak batik pesisir, motif tradisional Jawa berbaur dengan corak Tionghoa . gambar lilin, yaitu hewan kahyangan dalam mitologi Tionghoa sering terlihat dalam batik Cirebonan (Daradjadi, 2013: 68).

B. Cina Totok dan Cina Peranakan

Para pengamat minoritas Tionghoa di Indonesia mengetahui bahwa ada dua kelompok Tionghoa, yaitu Cina Peranakan dan Cina Totok, pengelompokan itu kurang lebih merupakan akibat dari perbedaan tingkat asimilasi mereka kedalam masyarakat pribumi (Leo, Suryadinata, 1984: 76). Tionghoa totok adalah orang asli Tionghoa yang berdarah murni Cina (totok Tionghoa), terutama untuk membedakannya dengan Babah atau peranakan. Tionghoa Peranakan dimaksudkan adalah orang Tionghoa yang lahir di Indonesia dan hasil perkawinan campuran antara orang Tionghoa dan orang Indonesia. Orang Tionghoa peranakan dalam banyak unsur kehidupannya telah banyak menyerupai orang Jawa, yang telah lupa akan bahasa asalnya dan bahkan ciri-ciri fisiknya telah menyerupai orang Indonesia. Sedangkan Tionghoa Totok adalah orang Tionghoa yang lahir di negeri Cina dan belum bisa berbahasa Indonesia, tetapi bisa berbicara bahasa Hokkien asli. Orang Tionghoa Totok juga masih erat dalam menjalankan hidupnya dengan budaya-budaya orang asli Tionghoa. Di Indonesia sendiri, tionghoa peranakan banyak terkumpul di pulau Jawa dan Tionghoa Totok umumnya berada diluar pulau Jawa. Dalam hal agama, mereka memeluk agama Budha, Konghuchu, Kristen atau Islam dan sebagian mempraktekkan ajaran agama sebagai agama tradisional.

Perbedaan antara Cina Peranakan dan Cina Totok sepintas sulit untuk dibedakan. Perbedaan pokok antara Cina Peranakan dan Cina Totok terletak pada bahasa yang digunakannya di rumah. Terdapat juga perbedaan-perbedaan dalam lafal dan ucapan dalam kehidupan sosial budaya dan dalam corak

pendidikan serta dalam adat istiadat lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh karena pengaruh dari lingkungan kehidupan masyarakatnya (Hidajat, Z. M, tt: 87). Perbedaan dalam kegiatan sosial ekonomi, orang-orang totok nampaknya lebih rajin dan lebih hemat dibandingkan dengan orang-orang Cina Peranakan. Orang Cina Totok sedapat mungkin dalam segala macam pekerjaan dilakukan sendiri atau dikerjakan bersama-sama diantara keluarga sendiri. Perbedaan dalam kehidupan keluarga dan dalam sistem kekerabatan, bagi orang Cina kebanyakan struktur kekerabatan berdasarkan garis Patrilineal (kebapaan). Orang Cina Totok pada umumnya masih tetap memegang teguh struktur kekerabatan Patrilineal ini. Sedangkan bagi orang Cina Peranakan telah banyak yang berubah dari sistem Patrilineal kepada sistem Bilateral. Kegiatan-kegiatan bagi orang Cina Totok dalam bidang sosial ekonomi dalam bidang politik, hampir selalu merupakan kegiatan seluruh anggota keluarga atau kerabatnya, khususnya dari pihak laki-laki.

Sistem kekerabatan masyarakat Cina Peranakan menurut William G. Skinner keluarga pihak wanita mempunyai kedudukan yang setingkat dengan pihak keluarga laki-laki, pergaulan dua belah pihak lebih intim. Hal inilah yang merupakan suatu perubahan kearah struktur kekerabatan Bilateral. Hal ini dikarenakan dalam struktur kekerabatan mereka setelah berada di Indonesia 2 sampai 3 generasi, tidak jelas lagi batas hubungan Patrilineal dan Matrilineal. Demikian juga pandangan orang Cina Peranakan terhadap anak laki-laki dan perempuan sama tidak dibedakan. Keadaan ini berbeda dengan kebiasaan pada keluarga Cina Totok, dimana penilaian terhadap anak laki-laki

akan lebih tinggi daripada anak perempuan.

Kaum Cina Peranakan adalah Cina Peranakan yang lahir di Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia yang dikenal sebagai bahasa Melayu Tionghoa. Menurut para sosiolog dan antropolog, Cina Totok adalah generasi pertama Cina atau generasi Selanjutnya, yang keturunannya bukan dari perkawinan campuran dengan penduduk setempat dan masih fasih satu atau lebih dari dialek bahasa Cina serta masih mempunyai kedekatan dengan budaya Cina (Yusiu, Liem, 2000:66).

Kaum Tionghoa Peranakan berbeda dengan orang Tionghoa Totok, dan kelompok ini merupakan bagian terbesar dari orang Tionghoa di Jawa. Pada tahun 1920, kaum Tionghoa Peranakan di Jawa merupakan 70% dari seluruh golongan penduduk Tionghoa, sepuluh tahun kemudian jumlahnya turun sedikit menjadi 63,5% dan menjelang tahun 1950-an menjadi sekitar 60% (Beny, tt:56).

Sebelum tiba di Jawa, pada tahun 1405 orang-orang Tionghoa terlebihsinggah di Samudra Pasai. Lalu mereka membentuk masyarakat Tionghoa islam yang pertama di Nusantara. Pertengahan kedua dari abad ke-20, orang Tionghoa di Jawa sebagian besar terdiri dari para pedagang dan pengrajin dari suku Hokkien. Disebabkan terutama oleh kesukaran-kesukaran pengangkutan dan oleh Dekrit Kekaisaran dari Dinasti Ching yang secara resmi melarang orang Tionghoa untuk meninggalkan dan masuk kembali ke negeri Cina. Orang Tionghoa laki-laki yang sampai ke Jawa tidak membawa keluarga mereka tetapi menikah dengan orang pribumi baik dari kalangan muslim nominal atau non-muslim, dan menetap. Dalam satu waktu

tumbuhlah satu masyarakat Tionghoa Peranakan.

Kaum Tionghoa peranakan biasanya mempunyai darah pribumi dari garis perempuan dan menempuh cara hidup yang sama dengan pribumi (Leo, Suryadinata, tt:20). Kaum lelakinya memakai baju panjang Cina, sedangkan kaum wanitanya memakai kebaya. Kaum Peranakan pada umumnya tidak berbicara bahasa Cina tetapi berkomunikasi dengan menggunakan bahasa setempat. Di pantai Utara Jawa tempat sebagian besar orang Tionghoa tinggal, menggunakan kombinasi antara bahasa Melayu pasar dan logat Hokkien sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa ini diperkaya dengan meminjam kata-kata dari bahasa Belanda dan bahasa-bahasa Barat lainnya. Menjelang akhir abad ke-19, bahasa itu telah berkembang menjadi Bahasa Melayu-Betawi, dan dalam abad sekarang dikenal sebagai Melayu Tionghoa. Bahasa Melayu Tionghoa ini menjadi bahasa umum dari Cina Peranakan. Menjelang abad ke-19, Cina Peranakan kemudian menjadi berdiri sendiri dalam arti bahwa kaum Peranakan itu menikah dengan sesama Cina peranakan, dan hal ini mungkin jumlah lelaki dan perempuan hampir sama besarnya. Para imigran Cina Peranakan baru membentuk satu kelompok peralihan kecil dan dengan cepat terasimilasi (Leo, Suryadinata, tt:20).

C. Kondisi Etnis Tionghoa di Pulau Jawa

Masyarakat pribumi cenderung terbuka dan menerima kedatangan etnis Tionghoa dengan baik. Walaupun sebagian masih susah menerimanya dengan baik karena berbagai perbedaan baik karakter maupun kebudayaan. Keberagaman orang Tionghoa di Pulau Jawa memang tidak dapat dipungkiri keberadaanya, karena pada dasarnya

mereka juga berasal dari beberapa suku yang berbeda. Selain karena kedatangannya yang bertahap dari berbagai priode pelayaran, mereka juga berasal dari berbagai daerah yang berbeda dari dataran Cina.

Keragaman tersebut juga berpengaruh terhadap pola interaksi dan akulturasi yang terjalin antara orang Tionghoa dengan penduduk setempat. Ada yang dengan mudah menyatu dengan budaya local (Jawa) dan sebaliknya masih ada juga yang sukar untuk membaaur dengan kebudayaan local bahkan cenderung eksklusif.

Dengan demikian, tidak sedikit kebudayaan Cina yang berakulturasi dengan kebudayaan Jawa dan membentuk budaya sendiri. Akibat dikeluarkan Intruksi Presiden No. 14 tahun 1967 tentang larangan penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat Cina, secara Tidak langsung menghalangi perkembangan kebudayaan Cina. Namun setelah dicabutnya Intruksi Presiden tersebut oleh Presiden Abdurahman Wahid pada tahun 2000, Pencabutan ini disambut dengan lega dan euporia bagi warga Cina. Sejak itu festival yang berhubungan dengan budaya Cina dilakukan secara terbuka. Misalnya perayaan Hari Raya Imlek diselenggarakan secara besar-besaran diberbagai kota. Bahkan sepuluh tahun setelah reformasi, kegiatan-kegiatan semacam ini semakin semarak dan variatif (Tomi Sujatmiko. Tt : 1).

Misalnya selain upacara keagamaan di Klenteng, berbagai kesenian dan kebudayaan Cina mulai berkembang lagi. Bahkan tidak sedikit masyarakat pribumi yang mempelajarinya bahkan mengadakan pertunjukan kesenian Cina, warga Cina juga menyelenggarakan perayaan dengan

berbagai hiburan bernuansa oriental yang dimodifikasi, misalnya penampilan *Chinese Drum* dan *Grouf Dong Fang Shen Yun*. Kegiatan lain misalnya kursus-kursus bahasa Cina yang diikuti oleh anak-anak orang Cina maupun pribumi. Di izinkannya mengadakan kegiatan-kegiatan semacam ini nampaknya baik sekali dalam rangka menghapus diskriminasi dan memperkenalkan budaya dan tradisi Cina kepada masyarakat Indonesia, sehingga akan muncul pemahaman bagi masyarakat pribumi (Tomi Sujatmiko, tt:1).

Namun demikian hal ini sempat mengkhawatirkan berbagai pihak, pemerhati masalah sosial budaya Cina ada kekhawatiran bahwa dengan semakin berkembangnya kebebasan untuk mengekspresikan budaya mereka akan menimbulkan perubahan orientasi budaya mereka, dan terjadi resinifikasi dan revitalisasi budaya Cina yang bias mengancam asimilasi (Tomi Sujatmiko, tt: 1). Seiring dengan dinamika politik yang terjadi di Tanah Air kondisi social dan politik di Era Reformasi mengalami perubahan yang mencolok bila dibandingkan dengan era sebelumnya. Peristiwa 1998 juga menjadi momentum positif bagi banyak kalangan, terutama masyarakat Tionghoa ini ditandai dengan munculnya berbagai organisasi dan partai politik (Chairul Mahfud, tt: 2). Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok. Hal ini menandai kebangkitan partisipasi sosial dan politik dari berbagai golongan.

D. Interaksi Etnis Tionghoa dengan Penduduk Lokal

Pada mulanya orang Tionghoa hanya menempati pemukiman-pemukiman khusus orang Tionghoa sehingga intensitas interaksi yang terjalin dengan warga pribumi hanya terbatas

pada interaksi perdagangan. Namun seiring perkembangan, orang-orang Tionghoa mulai tersebar diberbagai wilayah. Penolakan yang dialami dapat dating dengan berbagai alasan, misalnya kecemburuan, ketakutan, kemarahan, dan sebagainya. Orang Tionghoa kurang bergaul dengan alasan kesibukan pekerjaan. Salah satu sifat positif orang Tionghoa adalah pekerja keras, sehingga jika mereka bekerja sering kurang melihat waktu dan mengabaikan hal-hal yang sifatnya sosial. Etnis Tionghoa sejak kedatangannya ke Pulau Jawa sudah terkenal dengan mata pencahariannya dengan berdagang, juga terkenal sudah turun menurun tinggal di Pulau Jawa, mereka hidup berdampingan dengan masyarakat pribumi (Koenjaraningrat, 1994:21)

Orang-orang Tionghoa mulai tersebar tidak hanya di kompleks-kompleks pecinan namun juga diberbagai wilayah. Kegiatan perdagangan membuat mobiltas mereka sangat tinggi sehingga membuat pergaulan mereka dengan lingkungan sekitar tempat tinggal sangat jarang terjadi. Orang-orang Tionghoa terlihat cenderung eksklusif dan tertutup terhadap warga pribumi. Mereka (orang Tionghoa) yang pada umumnya lebih unggul dalam perekonomian cenderung lebih sibuk dengan pergaulannya dengan sesama orang Tionghoa dengan urusan bisnisnya. Anak-anak mereka juga dimasukan dalam sekolah-sekolah unggulan dengan murid-murid yang kebanyakan dari golongan mereka. Hal ini secara tidak langsung menutup pergaulan mereka dengan anak-anak keturunan pribumi yang pada umumnya bersekolah di sekolah-sekolah umum (Koenjaraningrat, 1994 :21).

Karena sikapnya dalam pergaulan sehari-hari yang cenderung tertutup ini

stereotip terhadap orang-orang Tionghoa yang eksklusif semakin subur tertanam pada warga pribumi. Sebagian besar orang pribumi menganggap orang-orang Tionghoa sebagai kelompok yang eksklusif dan hanya mengumpulkan harta dan melupakan kehidupan sosialnya. Walaupun sebagian orang Tionghoa mempekerjakan orang pribumi dalam usaha perdangannya namun intensitas hubungan yang terjalin antara keduanya kurang begitu baik. Beberapa warga mengungkapkan bahwa hubungan dengan orang-orang-Tionghoa hanya sebatas partner kerja dan relasi social yang terjalin hanya untuk kepentingan ekonomi bagi kedua belah pihak (Koenjaraningrat, 1994 : 22).

Berbeda dengan orang-orang Tionghoa yang tinggal diwilayah kompleks Tionghoa atau pecinan, orang-orang Tionghoa yang tinggal diluar wilayah itu cenderung lebih terbuka dan tidak lagi eksklusif. Dalam kehidupan sehari-hari interaksi yang terjalin dengan warga pribumi juga lebih terbuka sehingga membuat hubungannya dengan warga pribumi juga lebih baik. Ini terlihat pada interaksi yang terjadi antara orang-orang Tionghoa yang bermukim satu tempat dengan orang pribumi di beberapa pemukiman yang mayoritas dihuni oleh orang-orang pribumi. Orang-orang Tionghoa yang tinggal dipemukim tersebut dapat menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang ada dan berbaur tanpa suatu sekat yang menghalangi interaksi yang terjalin. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang orang-orang Tionghoa juga menggunakan bahasa Jawa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar (Koenjaraningrat, 1994 : 21).

Bahkan dalam lingkungan keluarga orang-orang Tionghoa juga lebih banyak memakai bahasa Jawa untuk

berkomunikasi dengan sesama orang Tionghoa. Tidak jarang juga bahasa Jawa yang digunakan termasuk bahasa Jawa *ngoko* (bahasa Jawa yang halus) yang biasa digunakan oleh masyarakat pribumi. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan seseorang untuk saling berinteraksi. Bahasa Jawa memiliki suatu system tingkat-tingkat yang sangat rumit, terdiri dari paling sedikit Sembilan gaya bahasa. System ini menyangkut perbedaan-perbedaan yang wajib digunakan, mengingat perbedaan kedudukan, umur, serta tingkat keakraban antara yang menyapa dan yang disapa (Koenjaraningrat, 1994 : 22). Dalam konsepsi orang Jawa, berbagai gaya ini menyebabkan adanya tingkatan-tingkatan bahasa yang berbeda-beda tinggi rendahnya. Tiga gaya yang paling dasar, yaitu gaya tidak resmi, dan gaya resmi (*ngoko*, *Madya*, dan *Krama*) (Koenjaraningrat, 1994 :22).

Dalam hal ini terlihat adanya usaha orang-orang Tionghoa melakukan proses Asimilasi (*Assimilation*) yaitu sebuah usaha untuk mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan (Soerjono Soekanto, 2010: 64) Dalam hal ini terlihat adanya usaha untuk mengurangi perbedaan antara mereka yang dilakukan oleh orang Tionghoa yang tinggal dipemukim masyarakat pribumi agar dapat berbaur dan menyatu dengan warga pribumi. Proses asimilasi tersebut terlihat jelas pada segi bahasa Jawayang banyak dikuasai orang-orang Tionghoa dan juga digunakan dalam praktiknya sehari-hari saat berinteraksi dengan warga pribumi.

Proses asimilasi ini berhasil menghilangkan sekat antara kedua

kelompok etnis tersebut dalam interaksi yang dilakukan sehari-hari. Dari berbagai pola interaksi yang ada, terlihat perbedaan yang mencolok antara orang Tionghoa yang tinggal di daerah pemukiman Tionghoa dengan orang Tionghoa yang tinggal diluar daerah tersebut. Orang Tionghoa yang tinggal di daerah khusus pecinan cenderung terlihat lebih eksklusif dan sukar untuk menyatu dengan orang-orang pribumi. Sementara orang Tionghoa yang tinggal diluar pemukiman Tionghoa lebih dapat menyatu dengan warga pribumi (Soerjono Soekanto, 2010 : 64).

E. Idiologi Pluralis Gus Dur: Nasib Etnis Tionghoa

Gus Dur adalah bapaknya pluralisme, karena beliau adalah orang yang selalu ingin memandang manusia siapapun dia dan dimanapun dia berada sebagai manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Gus Dur juga ingin mengasihinya. *“Takhalaqu bi akhlak Allah”* (berakhlaklah dengan akhlak Allah) (Husein Muhammad, tt : 102). Saling mengenal satu sama lain, memahami kebiasaan, tradisi, adat istiadat, pikiran, hasrat yang lain yang berbeda yang tak sama. Maka Gus Dur bukan sekedar menghargai atau menghormati, manusia yang berbuat baik, melaiikan juga menyambutnya dengan rendah hati dan rengkuhan yang hangat. Sebaliknya, ia akan menentang siapa saja yang merendahkan martabat manusia, apalagi menyakiti, mengurangi dan menghalangi hak-hak mereka. Ia akan membela mereka yang martabat kemanusiaanya direndahkan, mereka yang hak-haknya dikurangi, dipasung, disakiti dan ditelantarkan (Husein Muhammad, tt: 104).

Bagi Gus Dur semua manusia adalah sama, tak peduli dari mana asal usulnya, warna kulit mereka, suku

mereka, ras dan kebangsaan mereka. Yang Gus Dur lihat adalah bahwa mereka manusia sama seperti dirinya dan yang lain. Gus Dur bukan tidak paham bahwa ada yang keliru, ada yang ia setuju atau ada yang salah dari mereka yang dibelanya. Gus Dur tetap saja membela mereka. Ia membela karena tubuh mereka diserang dan dilukai hanya karena baju agamanya yang berwarna lain, harta mereka dirampas semauanya, ekspresi-ekspresi diri mereka dihentikan secara paksa oleh Negara atau direnggut dengan pedang oleh otoritas dominan dan kehormatan mereka diinjak-injak. Padahal mereka tak melakukan apa-apa. Membela kehormatan adalah perjuangan besar. Bagi Gus Dur, ekspresi-ekspresi diri, personal, individual yang dianggap sebagian orang sebagai tak bermoral, tak boleh melibatkan Negara, tak boleh diintervensi kekuasaan, tetapi, harus diselesaikan sendiri oleh masyarakat (Husein Muhammad, tt:105).

Pemaksaan atas pikiran dan keyakinan orang tak akan menghasilkan apa-apa, sia-sia kecuali membuat orang dan keluarganya menjadi sakit, menderita, dan menghambat kemajuan orang dan peradaban manusia. Tak ada cara lain untuk menundukan orang lain kecuali melalui bicara manis, tanpa marah-marah dan dengan otak yang cerda, jika tak tunduk biarkan masing-masing berjalan sendiri-sendiri, sambil katakan “anda adalah anda dan aku adalah aku” (Husein Muhammad, tt:106).

Banyaknya usaha-usaha KH. Abdurahman Wahid dalam menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia tahun 1999-2000 dipengaruhi oleh pemikiran KH. Abdurahman Wahid yang demokratis dalam implementasinya terhadap realita sosial di Indonesia. Hal ini meliputi nilai-nilai demokrasi, yaitu

plurarisme, kebebasan, keadilan, dan persamaan. KH. Abdurahman Wahid mempunyai pemikiran bahwa demokrasi adalah hak bagi siapapun, bukan kehendak mayoritas. Demokrasi akan mencapai esensinya jika terdapat adanya nernagai golongan dan kelompok, besar ataupun kecil, yang berbeda-beda bahkan bertentangan, yang berdasarkan suku, agama, keyakinan, etnis kelompokan kepentingan maupun kelompokan dasar lainnya, yang sama-sama berhak untuk dipertimbangkan dalam mengambil keputusan politik (Siska Yulia Nurda, dkk, tt:7).

Pemikiran demokrasi KH. Abdurahman Wahid ternyata tidak sejalan dengan implementasi kebijakan yang diberlakukan pada masa Orde Baru pemerintahan Soeharto, yaitu kebijakan asimilasi. Pada hakekatnya, asimilasi merupakan proses penyatu gabungan golongan-golongan yang mempunyai sikap mental, adat kebiasaan dan kebudayaan yang berbeda-beda menjadi suatu kebulatan sosiologis yang harmonis dan bermakna, yang dalam hal ini diartikan bangsa (*nation*) Indonesia. Implementasi kebijakan pemerintahan Orde baru terhadap etnis Tionghoa bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Selain itu juga sangat bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27. Terjadinya penyimpangan dari implementasi kebijakan asimilasi membuat KH. Abdurahman Wahid memilih demokrasi dan menempatkannya bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai sarana untuk menyempurnakan keadaan . KH. Abdurahman Wahid menilai demokrasi sebagai saran untuk memperbaiki kehidupan, jadi demokrasi harus diwujudkan secara terus menerus. Kebijakan KH. Abdurahman Wahid

dalam penghapusan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia tahun 2000 meliputi bidang sosial budaya dan bidang politik.

F. Kehidupan Etnis Tionghoa Pasca Pemerintahan Gus Dur

Sepanjang sejarah orde baru kesialan semakin berlipat dengan adanya karikatur-karikatur diskriminatif, pemberitaan-pemberitaan atau penulisan-penulisan yang mengandung bias, maupun humor-humor plesetan semuanya menambah bahan bakar prasangka terhadap kaum minoritas ini. Lebih lagi, melalui struktur penguasaan modal yang tidak berimbang, yang merupakan bagian dari rancangan legitimasi orde baru, terjadi penguasaan ekonomi sepihak oleh “cukong-cukong” orde baru yang dampaknya makin mengalienisasi serta memojokan kaum etnis Cina secara keseluruhan. Orang Cina dianggap matrealistik, serakah, asosial, tak peduli lingkungan dan banyak lagi hal-hal yang terkesan negatif. Selanjutnya ditahun 1998 terdapat sentimen *antichinese* yang telah bertahun-tahun dipupuk dan sengaja dikembangkan diantara masyarakat berpuncak pada kerusuhan rasial 14/15 mei dan berakhir dengan penjarahan, penyiksaan dan pemerkosaan massal terhadap warga etnis Tionghoa. Lalu munculah reformasi dan bergantinya tanpuk pemerintahan dari Soeharto ke B.J. Habibie (Siska Yulia Nurda, dkk, tt :6).

Pada 16 September 1998 B.J Habibie mengeluarkan Inpres No. 26/1998 yang menghapuskan penggunaan istilah pribumi dan mnon pribumi, memberikan arahan agar semua pejabat memberikan layanan yang sama kepada setiap warga negara serta menginstruksikan dilakukan peninjauan kembali dan penyelesaian seluruh produk

hukum perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Selain itu presiden B.J Habibie juga mengeluarkan Inpres No. 4 tahun 1999 yang menghapuskan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan izin perayaan tahun baru imlek sebagai Hari Nasional. Namun dalam keppresnya tidak konsisten dengan penjelasan UUD 1945. B.J Habibie masih belum menunjukkan perubahan signifikan terkait hak kebebasan mereka. Setelah memasuki awal era reformasi, etnis Tionghoa dapat bernafas lega. Pada era presiden Abdurrahman Wahid yang merupakan figur yang paling berjasa bagi etnis Tionghoa, karena beliau telah menerbitkan Keppres No. 6 tahun 2000 dan ditandatangani pada 17 Januari 2000 sekaligus mencabut Inpres No 14 tahun 1967 yang ditandatangani Soeharto pada 6 Desember 1967 (Siska Yulia Nurda, dkk, tt : 7).

Keputusan presiden Abdurrahman Wahid ini melahirkan kebebasan etnis Tionghoa dalam menjalankan ritual keagamaan, adat istiadat, serta memperbolehkan pengekspresian terhadap kebudayaannya di Indonesia pasca pencabutan kepres No. 14 tahun 1967, berbagai macam pengekspresian kebudayaan mulai berkembang di Indonesia. Pengekspresian budaya ditandai dengan maraknya seni budaya barongsai, naga Liong, dan kebudayaan Tionghoa lainnya yang sebelumnya dikembangkan dan dipertunjukkan hanya dalam lingkungan keluarga saja sudah mulai dapat dipentaskan secara bebas dimuka umum. Etnis Tionghoa dapat melakukan kegiatan keagamaan secara bebas dan kegiatan keagamaan etnis Tionghoa mendapat perlindungan resmi dari pihak keamanan negara seiring

dengan diakuinya Konghucu menjadi kepercayaan di Indonesia (Siska Yulia Nurda, dkk, tt: 7).

Dalam bidang politik muncul beragam organisasi dan partai-partai politik yang berkaitan dengan etnis Tionghoa. Hal ini dilakukan etnis Tionghoa untuk mengikis stereotip negatif yang selama ini dilekatkan pada etnis Tionghoa yaitu bahwa etnis Tionghoa hanya memperhatikan aspek ekonomi saja dan politik. Dengan masuk dalam bidang politik, etnis Tionghoa dapat terjun langsung dalam mengatasi permasalahan bangsa sehingga dapat menindaklanjuti proses pembangunan bangsa secara bersama-sama dengan etnis lainnya. Keadaan lain yang berpengaruh terhadap etnis Tionghoa adalah mengenai Hari Raya Imlek. Pada lengsernya K.H Abdurrahman Wahid pada tahun 2001 presiden Megawati menetapkan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional sebagai tindak lanjut kebijakan yang dikeluarkan K.H Abdurrahman Wahid dalam proses demokrasi Indonesia dan menjadi pendukung yang baik bagi etnis Tionghoa. Megawati juga mengeluarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yang menunjuk Departemen Agama untuk memfasilitasi guru agama Konghucu guna mengajarkan materi ajaran agama tersebut kepada murid yang menganutnya (Siska Yulia Nurda, dkk (Siska Yulia Nurda, dkk, tt : 8).

Dibawah kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, agama Konghucu diakui sebagai agama resmi dan sah. Berbagai kalangan etnis Tionghoa mendirikan partai politik LSM dan ORMAS. SBKRI tidak wajib lagi bagi WNI. Setelah 32 tahun berdiam mereka kembali melakukan kegiatan sosial, aktif dalam bidang pendidikan. Bahasa

Mandarin mulai diajarkan diberbagai sekolah sebagai bahasa alternatif disamping bahasa Inggris. Filsafat kalangan etnis Tionghoa sekarang adalah “berakar di bumi tempat berpijak” artinya lahir dan menetap di Indonesia selamalamanya.

KESIMPULAN

Sebelum berdirinya Negara yang diberi nama Indonesia ditanah Jawa, etnis Tionghoa sudah menginjakan kaki ditanah Jawa. Dari berbagai catatan sejarah para pedagang. Tionghoa telah datang kedaerah pesisir laut cina selatan sejak 300 tahun sebelum masehi, namun catatan sejarah tertulis menunjukkan mereka datang ke Asia Tenggara lama setelah itu. Beberapa catatan tertua ditulis oleh para agamawan, seperti Fa Hien pada abad ke-4 dan I Ching pada abad ke-7. Para pengamat minoritas Tionghoa di Indonesia mengetahui bahwa ada dua kelompok Tionghoa, yaitu Cina Peranakan dan Cina Totok. Tionghoa totok adalah orang asli Tionghoa yang berdarah murni Cina (totok Tionghoa), Perbedaan pokok antara Cina Peranakan dan Cina Totok terletak pada bahasa yang digunakannya di rumah. Terdapat juga perbedaan-perbedaan dalam logat dan dialek, ucapan dalam kehidupan sosial budaya dan dalam corak pendidikan serta dalam adat istiadat lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh karena pengaruh dari lingkungan kehidupan masyarakatnya.

KH. Abdurahman Wahid menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000, dilandasi oleh pemikiran demokrasi KH. Abdurahman Wahid tidak sejalan dengan implementasi kebijakan yang diberlakukan pada masa Orde Baru pemerintahan Soeharto, yaitu kebijakan

asimilasi. Pada hakekatnya, asimilasi merupakan proses penyatu gabungan golongan-golongan yang mempunyai sikap mental, adat kebiasaan dan kebudayaan yang berbeda-beda menjadi suatu kebulatan sosiologis yang harmonis dan bermakna, yang dalam hal ini diartikan bangsa (*nation*) Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Dahana . 2001. “Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa di Indonesia”, *Jurnal Wacana*, Vol 2 No 1

Adrian Perkasa. 2012. *Orang-orang Tionghoa dan Islam di Majapahit*. Yogyakarta: Ombak.

Daradjadi.2013.*Geger Pecinan 1740-1743, “Persekutuan Tionghoa Melawan VOC”*.. Yogyakarta: Buku Kompas.

Edi, Suharto.2009. *Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

FX. Lilik Dwi M. Imlek. 2019. *Tradisi Yang tak Lagi Sendiri* (Jakarta: ANTARA News). Dalam <http://www.antaraneews.com/berita/53516/imlek-tradisi-yang-tak-lagi-sendiri-diakses-29-04-2019>

Hidajat, Z. M, *Masyarakat dan Kebudayaan Cina di Indonesia*,

Husein Muhammad. Tt. “Pluralisme Gus Dur “Gagasan Para Sufi”, *Sumber Majalah Cahaya Sufi*,

Irfan Islamy.1993. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Karunia.

- Koenjaraningrat.1994. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo.2001. *Pengantar Ilmu Sejarah Cet-Ke 4*. Jogjakarta: Bentang.
- Leo, Suryadinata.1984. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Leo,Suryadinata.2010. *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*. Jakarta:Kompas Media Nusantara
- Leo, Suryadinata. Tt. *Politik Tionghoa Peranak di Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rustopa.2008. *Jawa Sejati : Otobiografi GoTik Swan*. Yogyakarta: Ombak.
- Siska Yulia Nurda, dkk, *Peranan KH. Abdurahman Wahid Dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia Tahun 1999-2000*
- Soerjono Soekanto.2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta : Rajawali Press.
- Suheri Sidik Ismail.1999. *Khulashah Sirah Gus Dur dari Pesantren ke Istana*. Surabaya: Dunia Ilmu.
- Tomi Sujatmiko, tt. “Perbedaan Pribumi dan Non Pribumi Sudah Kuno”, *Kedaulatan Rakyat*. Vol 2 No. 2
- W.P. Groeneveldt.2009. *Nusantara dalam catatan Tionghoa*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Yoga Ad. Attarmizi Dkk. 2000. *Gus Dur dari Pesantren ke Istana*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Yusiu, Liem.2000. *Prasangka Terhadap Etnis Cina: Evaluasi 33 Tahun di bawah Rejim Soeharto*. Jakarta: Djambatan.